

OPTIMALISASI PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR

Satriawan¹, Badarudin², Armin Subhani³

Program Studi Pendidikan Dasar, Program Magister, Universitas Hamzanwadi^{1,2,3}
e-mail: satriawan.220701073@student.hamzanwadi.ac.id¹, badarudin@hamzanwadi.ac.id²,
arminsubhani@hamzanwadi.ac.id³

ABSTRAK

Efektivitas komite sekolah tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya sebagai unsur kelembagaan, tetapi oleh sejauh mana hubungan kerja antara sekolah dan masyarakat mampu diterjemahkan ke dalam praktik pengelolaan pendidikan. Penelitian ini menelaah pelaksanaan peran tersebut di sekolah dasar Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekaligus memetakan kondisi yang mendukung, menghambat, dan memungkinkan penguatannya. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan lima informan yang terdiri atas kepala sekolah, pengurus komite, guru, dan orang tua peserta didik. Data diperoleh sejak Mei 2025 melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi, lalu ditelaah menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Temuan memperlihatkan bahwa komite menjalankan fungsi pemberi pertimbangan dalam perencanaan program dan kebijakan, pendukung dalam penyediaan sumber daya, pengontrol dalam pemantauan program dan anggaran, serta mediator dalam komunikasi sekolah dengan masyarakat. Keterlaksanaan fungsi tersebut ditopang komitmen kepala sekolah, komunikasi, transparansi, dan dukungan masyarakat, tetapi dibatasi pemahaman anggota, kapasitas sumber daya manusia, partisipasi, dan koordinasi. Penguatan kapasitas kelembagaan, kemitraan partisipatif, dan pembinaan berkelanjutan menjadi arah strategis yang relevan untuk memperkuat tata kelola pendidikan dasar yang lebih partisipatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Kata Kunci: *Komite Sekolah, Kualitas Pendidikan, Kemitraan Sekolah-Masyarakat, Tata Kelola Pendidikan*

ABSTRACT

The effectiveness of school committees is determined not merely by their existence as an institutional element, but by the extent to which the working relationship between schools and communities can be translated into educational management practices. This study examines the implementation of this role in elementary schools in Labuhan Haji District, East Lombok Regency, while also mapping the conditions that support, hinder, and enable its strengthening. A descriptive qualitative approach was employed with five informants consisting of school principals, school committee members, teachers, and parents. Data were collected beginning in May 2025 through participatory observation, in-depth interviews, and documentation, and were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña through data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that school committees perform advisory functions in program and policy planning, supporting functions in providing educational resources, controlling functions in monitoring programs and budgets, and mediating functions in communication between schools and communities. The implementation of these functions is supported by school leadership commitment, effective communication, transparency, and community support, but constrained by members' limited understanding, human resource capacity, participation, and coordination.

Strengthening institutional capacity, participatory partnerships, and continuous development is therefore a relevant strategic direction for fostering elementary education governance that is more participatory, transparent, and responsive to local community needs.

Keywords: *School Committee, Education Quality, School-Community Partnership, Education Governance*

PENDAHULUAN

Pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pencapaian akademik, tetapi juga dengan kemampuan sistem pendidikan membentuk peserta didik yang berkembang secara utuh. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menempatkan pendidikan sebagai proses yang dirancang secara sadar agar peserta didik mengembangkan potensi spiritual, kepribadian, kecerdasan, pengendalian diri, akhlak, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Republik Indonesia, 2003). Konsepsi tersebut menempatkan mutu layanan pendidikan sebagai persoalan yang tidak dapat dilepaskan dari kapasitas sekolah dalam mengelola sumber daya serta membangun hubungan dengan lingkungan sosialnya. Pada jenjang sekolah dasar, kebutuhan tersebut semakin relevan karena sekolah menjadi ruang awal pembentukan kemampuan akademik, karakter, dan kecakapan sosial peserta didik.

Perubahan tata kelola pendidikan kemudian memperluas ruang partisipasi di luar struktur internal sekolah. Kebijakan *Merdeka Belajar* mendorong kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari transformasi pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan peserta didik (Kemendikbudristek, 2021). Dalam praktik *school-based management*, keterlibatan masyarakat juga berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dan pengembangan satuan pendidikan; Augustyn et al. (2023) memperlihatkan posisi komite dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, sedangkan Mariani et al. (2024) mengaitkan kewenangan komite dengan peningkatan mutu pendidikan dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat bukan sekadar tambahan dukungan bagi sekolah, melainkan bagian dari mekanisme tata kelola yang dapat memengaruhi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pendidikan.

Secara kelembagaan, ruang partisipasi tersebut diwujudkan melalui Komite Sekolah. Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 menempatkan Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan melalui pemberian pertimbangan, penggalangan sumber daya, pengawasan pelayanan, serta tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016). Dalam praktiknya, fungsi tersebut berkaitan dengan peran sebagai *advisory agency*, *supporting agency*, *controlling agency*, dan mediator antara sekolah dengan masyarakat. Nuraya et al. (2021) dan Nurhasanah et al. (2021) menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi tersebut dapat berkontribusi terhadap kualitas layanan dan mutu pendidikan, tetapi keberadaan mandat formal belum otomatis menjamin efektivitas pelaksanaannya. Persoalan penelitian dengan demikian bergeser dari sekadar keberadaan komite menuju pertanyaan mengenai bagaimana fungsi tersebut benar-benar dijalankan dalam tata kelola sekolah.

Efektivitas peran komite juga dipengaruhi oleh kualitas keterlibatan dan kapasitas aktor yang menjalankannya. Sukinawan et al. (2025) menempatkan komite sebagai aktor strategis dalam peningkatan mutu pendidikan, sementara Agbi et al. (2024) menunjukkan bahwa pengetahuan dan keterlibatan *School Management Committees* dalam *school improvement plans* memiliki implikasi terhadap kualitas pendidikan. Pada konteks lain, Abbas et al. (2025) memperlihatkan kontribusi *school councils* dan keterlibatan masyarakat

terhadap peningkatan kualitas pendidikan di sekolah publik. Ketiga perspektif tersebut memperluas pemahaman bahwa kontribusi komite tidak cukup diukur dari frekuensi keterlibatannya, tetapi juga dari kapasitasnya dalam memengaruhi perencanaan, dukungan sumber daya, pengawasan, dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Dengan demikian, terdapat kemungkinan jarak antara fungsi yang telah ditetapkan secara normatif dan kualitas pelaksanaannya dalam konteks sekolah yang berbeda.

Jarak antara mandat dan praktik tersebut menjadi titik persoalan yang perlu ditelaah lebih kontekstual. Kajian yang ada telah membahas implementasi fungsi komite, kewenangan kelembagaan, manajemen berbasis sekolah, serta keterlibatan masyarakat, tetapi masing-masing masih menonjolkan aspek tertentu dalam konteks wilayah atau satuan pendidikan yang berbeda (Nuraya et al., 2021; Nurhasanah et al., 2021; Mariani et al., 2024; Augustyn et al., 2023). Kajian internasional juga memperlihatkan bahwa keterlibatan komite atau dewan sekolah berkaitan dengan perencanaan pengembangan dan kualitas pendidikan, tetapi struktur kelembagaan serta konteks sosialnya tidak sepenuhnya identik dengan Komite Sekolah di Indonesia (Agbi et al., 2024; Abbas et al., 2025). Sementara itu, Sukinawan et al. (2025) menegaskan posisi strategis komite, tetapi kajiannya bersifat tinjauan literatur sehingga belum menggambarkan secara langsung dinamika pelaksanaan fungsi komite pada konteks lokal tertentu. Kondisi tersebut menyisakan ruang untuk memahami secara terpadu bagaimana empat fungsi komite bekerja dalam konteks sekolah dasar pada tingkat kecamatan, termasuk kondisi yang memperkuat atau justru membatasi pelaksanaannya.

Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, menjadi konteks yang relevan untuk mengisi ruang tersebut karena penelitian ini tidak memandang konteks lokal hanya sebagai lokasi penelitian, tetapi sebagai lingkungan yang dapat membentuk pola hubungan sekolah dan masyarakat. Persoalan yang dikaji bukan sekadar apakah komite menjalankan fungsi pertimbangan, dukungan, pengawasan, dan mediasi, melainkan bagaimana keempat fungsi tersebut saling berhubungan dalam praktik pengelolaan pendidikan. Penelitian ini juga menempatkan faktor pendukung dan penghambat sebagai bagian dari proses analisis, sehingga optimalisasi tidak dipahami sebagai penambahan aktivitas komite, tetapi sebagai upaya memperbaiki kondisi yang memungkinkan setiap fungsi bekerja secara lebih efektif. Pendekatan tersebut menjadi pembeda dari kajian yang terutama mendeskripsikan peran komite secara parsial, sekaligus menghasilkan dasar yang lebih operasional bagi sekolah, komite, dan pemerintah daerah dalam memperkuat kemitraan pendidikan. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan peran komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar, (2) menganalisis kontribusi komite sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator, (3) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat optimalisasi peran komite sekolah, serta (4) merumuskan strategi optimalisasi peran komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan dilaksanakan di sekolah dasar Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, mulai Mei 2025. Penggalan data diarahkan pada pelaksanaan empat fungsi komite sekolah, yaitu pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengontrol (*controlling agency*), dan mediator (*mediating agency*), serta faktor pendukung, faktor penghambat, dan upaya optimalisasi yang ditemukan di lapangan. Informan dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap aktivitas komite sekolah. Informan penelitian berjumlah lima orang, terdiri atas satu kepala sekolah, dua pengurus komite sekolah, satu guru, dan satu orang tua peserta didik.

Pengumpulan data berlangsung melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada kelima informan menggunakan pedoman semi-terstruktur yang mencakup keterlibatan komite dalam penyusunan program, dukungan terhadap kebutuhan sekolah, pemantauan kegiatan dan penggunaan sumber daya, komunikasi dengan orang tua, serta kondisi yang mendukung dan menghambat pelaksanaan fungsi komite. Observasi diarahkan pada aktivitas yang berkaitan dengan rapat koordinasi, keterlibatan komite dalam kegiatan sekolah, pengambilan keputusan, serta interaksi antara sekolah, komite, dan orang tua, sedangkan dokumentasi mencakup RKS, RKAS, program kerja komite, notulen rapat, laporan kegiatan, dan dokumentasi kegiatan yang relevan. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dengan menggunakan pedoman wawancara, lembar observasi, dan format dokumentasi yang ditelaah bersama dosen pembimbing sebelum digunakan.

Analisis dilakukan secara bertahap sejak data mulai diperoleh dengan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Transkrip wawancara dikondensasikan berdasarkan empat fungsi komite, faktor pendukung, faktor penghambat, dan strategi optimalisasi, kemudian dibandingkan dengan catatan observasi dan dokumen yang relevan. Data yang telah dikelompokkan disajikan secara tematik untuk menemukan pola yang berulang, sementara kesimpulan diperiksa kembali selama proses analisis agar tetap sesuai dengan data lapangan. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari kelima informan, triangulasi teknik melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta *member check* dengan mengonfirmasi kembali informasi dan temuan kepada informan yang bersangkutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Implementasi Peran Komite Sekolah

Observasi dan wawancara pada sekolah dasar di Kecamatan Labuhan Haji menemukan keterlibatan komite sekolah dalam empat fungsi, yaitu pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator. Keterlibatan tersebut ditemukan dalam perencanaan program, dukungan sumber daya, pemantauan kegiatan, serta komunikasi antara sekolah dan masyarakat. Bentuk temuan pada masing-masing fungsi diringkas dalam Tabel 1.

Tabel 1. Bentuk Implementasi Peran Komite Sekolah

Fungsi Komite Sekolah	Bentuk Implementasi
Pemberi pertimbangan (<i>advisory agency</i>)	Terlibat dalam penyusunan RKS dan RKAS, memberikan masukan terhadap program sekolah, serta menyampaikan pertimbangan mengenai kebutuhan sarana dan pembelajaran
Pendukung (<i>supporting agency</i>)	Membantu pengadaan sarana, menggalang dukungan orang tua, serta memberikan dukungan tenaga dan pemikiran
Pengontrol (<i>controlling agency</i>)	Mengikuti pemantauan penggunaan BOS, mencermati pelaksanaan program, dan memberikan masukan dalam evaluasi kegiatan
Mediator (<i>mediating agency</i>)	Menyampaikan aspirasi orang tua, membantu sosialisasi program, dan menjembatani komunikasi sekolah dengan masyarakat

Data pada Tabel 1 memperlihatkan bentuk keterlibatan komite yang ditemukan selama penelitian. Pada fungsi pemberi pertimbangan, komite terlibat dalam pembahasan RKS, Copyright (c) 2025 ELEMENTARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar

RKAS, program sekolah, serta kebutuhan peserta didik. Ketua komite menyatakan, *“Sebelum program ditetapkan, kami biasanya diajak berdiskusi dan diberi kesempatan menyampaikan masukan dari orang tua dan masyarakat.”*. Pada fungsi pendukung, guru menyampaikan, *“Komite ikut membantu ketika sekolah membutuhkan sarana dan juga mengajak orang tua untuk mendukung kegiatan yang sudah disepakati.”*.

Fungsi pengontrol ditemukan melalui keterlibatan komite dalam pemantauan program dan penggunaan dana BOS. Kepala sekolah menjelaskan, *“Kalau ada program yang sudah berjalan, komite tetap dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi, termasuk ketika ada hal yang perlu kami jelaskan terkait penggunaan anggaran.”*. Sementara itu, fungsi mediator terlihat dalam penyampaian aspirasi dan informasi antara orang tua dengan sekolah. Orang tua peserta didik mengungkapkan, *“Kalau ada masukan dari orang tua, biasanya kami sampaikan melalui komite, kemudian komite membantu menyampaikannya kepada sekolah”*. Hasil observasi juga mencatat adanya rapat koordinasi dan pertemuan yang melibatkan sekolah, komite, dan orang tua dalam pembahasan program serta kebutuhan sekolah.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Selain bentuk implementasi tersebut, penelitian menemukan sejumlah kondisi yang berkaitan dengan pelaksanaan peran komite sekolah. Faktor pendukung meliputi komitmen kepala sekolah, komunikasi terbuka, transparansi pengelolaan sekolah, serta dukungan orang tua dan tokoh masyarakat. Faktor penghambat meliputi pemahaman anggota yang belum merata mengenai tugas komite, keterbatasan sumber daya manusia dan dana, partisipasi masyarakat yang belum merata, serta koordinasi internal yang belum optimal. Rangkuman temuan tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Komite Sekolah

Kategori	Temuan
Pendukung	Komitmen kepala sekolah, komunikasi terbuka, transparansi, dukungan orang tua dan tokoh masyarakat
Penghambat	Pemahaman tugas komite belum merata, keterbatasan SDM dan dana, partisipasi masyarakat belum merata, koordinasi internal belum optimal

Sebagaimana dirangkum pada Tabel 2, keterbukaan sekolah terhadap masukan komite menjadi salah satu kondisi yang ditemukan mendukung pelaksanaan kegiatan. Kepala sekolah menyampaikan, *“Kami berusaha melibatkan komite ketika ada keputusan atau program yang perlu dibicarakan bersama, sehingga mereka mengetahui apa yang sedang direncanakan sekolah.”*. Di sisi lain, wawancara dengan pengurus komite menemukan bahwa sebagian anggota masih belum memahami tugas dan tanggung jawabnya secara menyeluruh, sementara keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sekolah belum berlangsung secara merata. Temuan tersebut juga disertai keterbatasan dana dan koordinasi internal sebagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan komite.

Strategi Optimalisasi

Hasil wawancara mengarah pada beberapa kebutuhan perbaikan yang dapat dirumuskan sebagai strategi optimalisasi, yaitu penguatan pemahaman anggota mengenai tugas dan fungsi komite, peningkatan koordinasi antara sekolah dan komite, perluasan komunikasi dengan orang tua, serta penguatan mekanisme pemantauan program. Strategi tersebut dirumuskan dari faktor pendukung dan penghambat yang ditemukan selama penelitian, bukan sebagai tambahan kegiatan di luar temuan lapangan. Dengan demikian,

strategi optimalisasi dalam penelitian ini berfokus pada perbaikan kapasitas, koordinasi, partisipasi, dan pengawasan. Pengurus komite menyampaikan, *“Kami masih perlu meningkatkan pemahaman anggota tentang tugas komite dan membuat koordinasi lebih rutin supaya setiap anggota mengetahui apa yang harus dilakukan.”*

Pembahasan

Temuan di Kecamatan Labuhan Haji memperlihatkan bahwa keberadaan komite sekolah memperoleh makna ketika keterlibatannya terhubung dengan proses pengelolaan sekolah. Komite tidak hanya hadir pada forum tertentu, tetapi terlibat dalam pemberian masukan terhadap program, penyediaan dukungan, pemantauan pelaksanaan kegiatan, dan penyampaian aspirasi masyarakat. Pola tersebut memperlihatkan bahwa fungsi komite lebih tepat dipahami sebagai rangkaian peran yang saling berhubungan daripada empat tugas yang berjalan secara terpisah. Mar’ati (2022), melalui kajian pustakanya, juga menempatkan fungsi pertimbangan, pengontrol, pendukung, dan mediator sebagai satu kesatuan peran dalam mendukung mutu pendidikan. Dengan demikian, temuan lapangan mengarah pada pemahaman bahwa keberfungsian komite ditentukan oleh sejauh mana keempat peran tersebut memperoleh ruang dalam tata kelola sekolah.

Keterlibatan tersebut tampak terutama pada proses ketika kebutuhan sekolah diterjemahkan menjadi program dan keputusan. Masukan komite mengenai RKS, RKAS, sarana pembelajaran, serta kegiatan sekolah memperlihatkan adanya ruang bagi masyarakat untuk ikut mempertimbangkan arah pengembangan sekolah. Ruang tersebut menjadi lebih bermakna karena tidak berhenti pada penyampaian pendapat, tetapi berlanjut pada dukungan terhadap pelaksanaan program yang telah disepakati. Firman dan Arfin (2022) menemukan pola yang serupa dalam penelitian kualitatifnya, yakni komite menjalankan fungsi pertimbangan, memberikan dukungan, melakukan pengawasan, serta menyalurkan aspirasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Temuan Suyitno (2021) memberikan perspektif tambahan bahwa peran komite memiliki hubungan positif dan signifikan dengan efektivitas Manajemen Berbasis Sekolah, meskipun pengaruh keterampilan manajerial kepala sekolah dalam penelitian tersebut lebih dominan. Hal ini membantu menjelaskan bahwa kontribusi komite tidak dapat dilepaskan dari tata kelola sekolah yang menyediakan ruang kerja sama dan pembagian peran yang jelas.

Dimensi partisipasi menjadi semakin terlihat ketika komite berfungsi sebagai penghubung antara sekolah dan lingkungan sosialnya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa komunikasi yang berlangsung melalui komite memungkinkan orang tua menyampaikan aspirasi, sementara sekolah dapat menjelaskan program dan kebijakan kepada masyarakat. Dengan pola demikian, fungsi mediator bukan hanya persoalan menyampaikan informasi, tetapi juga menyediakan jalur komunikasi ketika terdapat kebutuhan, keluhan, atau persoalan yang perlu dipertemukan. Analisna et al. (2024) menempatkan partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, sedangkan Maharani (2025) menekankan kolaborasi sekolah, orang tua, dan masyarakat sebagai bagian dari penguatan mutu pendidikan. Temuan tersebut relevan dengan kondisi di Labuhan Haji karena keberadaan komite menyediakan struktur yang memungkinkan partisipasi masyarakat berlangsung melalui hubungan yang lebih terorganisasi. Dengan demikian, kualitas kemitraan tidak hanya bergantung pada seberapa sering pertemuan dilakukan, tetapi pada kemampuan forum tersebut menghubungkan aspirasi masyarakat dengan kebutuhan nyata sekolah.

Hubungan antara partisipasi dan tata kelola juga terlihat pada fungsi pengawasan. Komite dalam penelitian ini memperoleh akses untuk memantau pelaksanaan program dan penggunaan sumber daya, sehingga keterlibatan masyarakat tidak hanya berbentuk dukungan

material. Pengawasan tersebut memberi ruang bagi pihak di luar struktur sekolah untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program sekaligus menyampaikan masukan apabila ditemukan hal yang perlu diperbaiki. Perspektif ini selaras dengan Yuliana et al. (2025) yang mengaitkan Manajemen Berbasis Sekolah dengan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pendidikan. Namun, fungsi pengontrol dalam konteks penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai mekanisme pemantauan dan pemberian umpan balik daripada pengambilalihan kewenangan sekolah. Posisi tersebut memungkinkan pengawasan tetap berada dalam kerangka kemitraan, sehingga akuntabilitas dapat diperkuat tanpa mengaburkan batas tanggung jawab antara sekolah dan komite.

Kendati demikian, keterlibatan formal belum selalu identik dengan kapasitas partisipasi yang kuat. Penelitian menemukan bahwa pemahaman sebagian anggota terhadap tugas komite masih terbatas, kemampuan sumber daya manusia belum merata, dan partisipasi masyarakat belum selalu konsisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur organisasi saja belum cukup untuk menghasilkan kontribusi yang optimal; anggota membutuhkan pengetahuan mengenai fungsi, batas kewenangan, dan cara berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sekolah. Anggraini et al. (2025) memperlihatkan bahwa peran strategis komite berkaitan dengan gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam optimalisasi layanan pendidikan, sehingga hubungan antara kepemimpinan dan kapasitas komite menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan. Temuan Zaheer et al. (2022) juga memperlihatkan bahwa *school councils* dapat berperan aktif dalam langkah administratif dan *school improvement* ketika anggota masyarakat dilibatkan secara nyata dalam forum sekolah. Dalam konteks Labuhan Haji, temuan tersebut memperkuat argumen bahwa efektivitas partisipasi membutuhkan kepemimpinan yang membuka ruang keterlibatan sekaligus anggota komite yang memahami bagaimana ruang tersebut digunakan.

Atas dasar kondisi tersebut, penguatan komite lebih relevan diarahkan pada kapasitas dan mekanisme kerja daripada sekadar meningkatkan aktivitas pertemuan. Anggota komite perlu memperoleh pemahaman yang memadai mengenai perencanaan program, pengelolaan sumber daya, pengawasan, komunikasi publik, serta batas kewenangan dalam hubungan dengan sekolah. Neupane (2025) menempatkan *school management committee* sebagai bagian dari tata kelola dan pengembangan sekolah, sehingga penguatan kapasitas kelembagaan dapat dipandang sebagai bagian dari penguatan tata kelola sekolah secara keseluruhan. Penguatan tersebut dapat diterjemahkan melalui pelatihan, pendampingan, pembagian tanggung jawab yang lebih jelas, dan forum komunikasi yang terjadwal antara kepala sekolah, guru, komite, serta orang tua. Dalam praktiknya, strategi tersebut juga perlu disesuaikan dengan kapasitas masyarakat setempat agar partisipasi tidak dibebankan hanya kepada anggota komite tertentu. Dengan pendekatan seperti itu, penguatan kapasitas tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan pengurus, tetapi diarahkan pada kemampuan mereka untuk mengubah pengetahuan tersebut menjadi praktik kemitraan yang nyata.

Jika keseluruhan temuan dibaca secara terpadu, optimalisasi komite sekolah di Kecamatan Labuhan Haji lebih tepat ditempatkan sebagai proses membangun hubungan kelembagaan yang memungkinkan sekolah dan masyarakat bekerja pada tujuan yang sama. Empat fungsi komite memperoleh makna ketika pemberian pertimbangan terhubung dengan dukungan, dukungan disertai pengawasan, dan pengawasan tetap dibangun melalui komunikasi yang terbuka. Perspektif tersebut konsisten dengan Firman dan Arfin (2022) mengenai keterpaduan empat fungsi komite, sekaligus sejalan dengan temuan Suyitno (2021) mengenai keterkaitan peran komite dengan efektivitas MBS. Pada saat yang sama, partisipasi masyarakat yang dibahas Analisna et al. (2024), kolaborasi sekolah-orang tua-masyarakat yang dikaji Maharani (2025), serta penguatan tata kelola yang dibahas Yuliana et al. (2025)

memberi konteks bahwa kemitraan pendidikan membutuhkan mekanisme yang lebih luas daripada keterlibatan komite secara administratif. Oleh karena itu, temuan penelitian ini tidak menempatkan komite sebagai satu-satunya penentu mutu pendidikan, melainkan sebagai salah satu unsur penghubung yang dapat memperkuat partisipasi, akuntabilitas, komunikasi, dan dukungan masyarakat ketika didukung oleh kepemimpinan sekolah serta kapasitas kelembagaan yang memadai.

KESIMPULAN

Peran komite sekolah di sekolah dasar Kecamatan Labuhan Haji telah berjalan melalui empat fungsi yang saling terhubung, yakni memberikan pertimbangan dalam arah program sekolah, mendukung penyediaan sumber daya, melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan program, serta menjembatani komunikasi antara sekolah dan masyarakat. Keempat fungsi tersebut menunjukkan bahwa komite sekolah tidak hanya berperan sebagai pelengkap kelembagaan, tetapi menjadi bagian dari mekanisme kemitraan yang mempertemukan kebutuhan sekolah dengan aspirasi masyarakat. Pelaksananya didukung oleh keterbukaan kepala sekolah, komunikasi yang baik, transparansi, serta dukungan orang tua dan masyarakat, sedangkan keterbatasan pemahaman anggota, kapasitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, dan koordinasi masih menjadi kendala yang perlu ditangani. Karena itu, optimalisasi peran komite lebih tepat diarahkan pada penguatan kapasitas pengurus dan pembentukan pola kemitraan yang jelas, terbuka, dan berkelanjutan daripada sekadar meningkatkan intensitas keterlibatan komite dalam kegiatan sekolah.

Implikasi penelitian ini mengarah pada perlunya sekolah dan pemerintah daerah membangun pembinaan komite yang tidak berhenti pada pembentukan struktur, tetapi berlanjut pada penguatan kompetensi, komunikasi, dan mekanisme partisipasi yang sesuai dengan kebutuhan setempat. Bagi sekolah, temuan ini dapat menjadi dasar untuk memperluas ruang dialog dan melibatkan komite secara bermakna dalam perencanaan serta evaluasi program; bagi komite, hasil penelitian memberi arah untuk memperkuat kapasitas dalam menjalankan fungsi kemitraan secara bertanggung jawab. Pengembangan penelitian berikutnya dapat diarahkan pada perbandingan antarsekolah atau antarwilayah dengan karakteristik masyarakat yang berbeda, maupun menggunakan pendekatan *mixed methods* untuk mengkaji lebih jauh keterkaitan antara kapasitas komite, pola kepemimpinan sekolah, partisipasi masyarakat, dan kualitas layanan pendidikan. Dengan demikian, penguatan komite sekolah tidak ditempatkan semata sebagai agenda kelembagaan, tetapi sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pendidikan dasar yang lebih partisipatif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, T., Anwar, M. N., & Khizar, A. (2025). Exploring the contribution of school councils and community engagement in enhancing the quality of education in Punjab's public schools. *The Knowledge*, 4(3), 22–31. <https://doi.org/10.55737/tk/2k25c.43074>
- Agbi, R. M., Nudzor, H. P., & Agbevanu, W. K. (2024). School management committees' knowledge and involvement in school improvement plans: Implications for quality education. *Educational Planning*, 31(2), 63–79. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1425314>
- Anggraini, W. D., Syoviana, E., Agustian, H., Hasan, A., Putra, H. E., & Syam, F. (2025). Peran strategis komite sekolah dan gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam optimalisasi mutu layanan pendidikan di sekolah menengah atas. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 13(2), 742–760. <https://jurnal.konselingindonesia.com/index.php/jkp/article/view/1509>

- Analisna, A., Sulistiani, S., & Yasin, M. (2024). Partisipasi masyarakat dalam pendidikan. *AL-AMIYAH: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 1–12. <https://miftahul-ulum.or.id/ojs/index.php/alamiyah/article/view/67>
- Augustyn, S., HendrikWenno, I., & Lokollo, L. J. (2023). Peran komite sekolah dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah pada lingkup Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. JB Sitanala Cabang Masohi Maluku Tengah 2023. *EDUKASIA Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(2), 1163–1172. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v4i2.409>
- Firman, F., & Arfin, A. (2022). Efektifitas peran komite sekolah dalam peningkatan mutu sekolah. *Journal of Education and Teaching (JET)*, 3(2), 203–212. <https://doi.org/10.51454/jet.v3i2.187>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117. <https://bpmppkalteng.kemendikdasmen.go.id/permendikbud-nomor-75-tahun-2016>
- Kemendikbudristek. (2021). *Merdeka Belajar: Transformasi pendidikan untuk Indonesia maju*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Maharani, A. (2025). Kolaborasi sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan. *Journal Manajemen Pendidikan*, 1(1), 15–27. <https://journal-fkip.unsika.ac.id/index.php/JMP/article/view/13138>
- Mar'ati, A. (2022). Peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. *Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 10(2), 478–484. <https://doi.org/10.20961/jkc.v10i2.65774>
- Mariani, N. K., Sihotang, E., & Sukardi, N. M. R. (2024). Kewenangan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 2(5), 52–74. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i5.1290>
- Muttaqin, Z., & Nurwati, N. (2021). Peran komite sekolah dalam mengembangkan mutu pendidikan di sekolah. *Civics*, 9(1), 85–90. <https://www.neliti.com/publications/367488/peran-komite-sekolah-dalam-mengembangkan-mutu-pendidikan-di-sekolah>
- Neupane, K. (2025). *School governance: Role of school management committee in school development* [Doctoral dissertation]. <https://elibrary.tucl.edu.np/items/62e18408-a542-4093-9bb8-a33489b021c8>
- Nurahasah, R., Adriani, A., Bilqis, B., & Putri, A. A. (2021). Peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. *JURNAL MAPPESONA*, 4(1). <https://ejournal.iain-bone.ac.id/index.php/mappesona/article/view/1770>
- Nuraya, N., Adiman, A., Herawati, E. S. B., Warlizasusi, J., & Aliyyah, R. R. (2021). Implementation of the roles and functions of the school committee in improving the quality of education services in the city of Cirebon. *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 5(1), 81–100. <https://repository.iaincurup.ac.id/551/>
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>
- Sukinawan, K., Karwanto, K., Widodo, B. S., Khamidi, A., Haq, M. S., & Amalia, K. (2025). Peran strategis komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan: Tinjauan

- literatur. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(4), 3974–3982. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i4.7628>
- Suyitno, S. (2021). Pengaruh keterampilan manajerial kepala sekolah dan peran komite terhadap efektivitas manajemen berbasis sekolah. *Jurnal Basicedu*, 5(3), 1564–1576. <https://repository.unisbablitar.ac.id/id/eprint/43/>
- Yuliana, R., Fatila, H., Diliza, N. N., Latifah, D., & Turahma, I. (2025). Manajemen berbasis sekolah sebagai instrumen penguatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pendidikan. *Almufi Jurnal Pendidikan*, 5(3), 89–94. <https://mail.almufi.com/index.php/AJP/article/view/622>
- Zaheer, S., Ehsan, T., & Yousuf, M. I. (2022). Role of school councils for developing community participation in school improvement. *Pakistan Languages and Humanities Review*, 6(2), 246–256. [https://doi.org/10.47205/plhr.2022\(6-II\)21](https://doi.org/10.47205/plhr.2022(6-II)21)